

Tata Kelola Strategik Peningkatan Inovasi Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang Tahun 2020-2022)

Muhammad Ganesha Putra¹, Rachma Fitriati²

^{1,2} Faculty of Administrative Science, Universitas Indonesia

¹muhammad.ganesha21@ui.ac.id, ²rachma.fitriati@ui.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of increased Regional Innovation and describe the stages of strategies the Palembang City Government implemented based on Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government and Government Regulation No. 38 of 2017 concerning Regional Innovation. Palembang City experienced innovation stagnation in 2018. However, from 2020 to 2022, it became Indonesia's most innovative city. This study uses a qualitative method, with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and literature study. The study results show that the Palembang City Government uses five key aspects that are the pillars of the innovation strategy to become the most innovative city in Indonesia. The results also show that the amount of commitment and the right strategy from the local government can increase innovation and regional competitiveness

Keywords: Strategic governance, regional innovation, public policy, research and development agency

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan peningkatan Inovasi Daerah dan mendeskripsikan tahapan strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Palembang berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Kota Palembang mengalami stagnansi inovasi pada tahun 2018. Namun pada tahun 2020 hingga 2022 berhasil menjadi kota terinovatif di Indonesia. Studi ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan studi literature. Hasil studi menunjukkan Pemerintah Kota Palembang menggunakan lima tahapan kunci yang menjadi pilar dari strategi inovasi untuk menjadi kota terinovatif di Indonesia. Hasil kajian juga menunjukkan besarnya komitmen dan strategi yang tepat dari pemerintah daerah dapat meningkatkan inovasi dan daya saing daerah

Kata kunci: Tata kelola strategik, inovasi daerah, kebijakan publik, badan penelitian dan pengembangan

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, hak, tanggung jawab, dan kewenangan daerah untuk mengatur dan menjalankan urusan

pemerintahan dan kebutuhan penduduk sesuai dengan hukum yang berlaku disebut sebagai otonomi daerah. Konsep otonomi daerah dilihat sebagai alat untuk meningkatkan pembangunan lokal, penguatan, dan menciptakan

karakteristik kemandirian dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Namun, otonomi yang diberikan kepada daerah tidak berarti daerah dapat beroperasi sepenuhnya tanpa mempertimbangkan hukum yang lebih tinggi dan kepentingan nasional.

Meningkatkan kemampuan daerah dalam pelaksanaan otonomi membutuhkan inovasi dan tata kelola strategik dalam pengelolaan pemerintahannya. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang jelas bagi para pejabat lokal untuk mendorong inovasi.

Titik awal untuk mengkaji isu-isu tata kelola strategis adalah konsep 'tata kelola' (Doeveren, 2011; Mulgan & Potucek, 2004; Osborne, D. and Gaebler, T., 1992; Osborne, 2006; Pollitt & Bouckaert, 2011, 2017). Tata kelola dapat dilihat dari berbagai perspektif. Tata kelola dapat dilihat dari perspektif pembuatan kebijakan, dalam hal peran lembaga (Forbes & Milliken, 1999; Ghosh & John, 2005), atau dilihat dari perspektif hasil yang dicapai yang memberikan informasi tentang seberapa efektif pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya. Terkait dengan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas

tergantung pada administrasi urusan publik. Oleh karena itu, masuk akal untuk mencari jawaban atas pertanyaan bagaimana meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Fenomena tata kelola pemerintahan juga dapat ditelaah berdasarkan karakteristik (sifat) yang berbeda, seperti isi, kualitas, kondisi, perspektif pembangunan, dan lain-lain. Berdasarkan karakteristik ini, kita berbicara tentang 'spesies' (mode) tata kelola pemerintahan. Salah satunya adalah 'tata kelola strategis'. Dalam literatur, kita menemukan berbagai definisi istilah 'tata kelola strategis', serta konsep dan pendekatan yang berbeda (Ochrana et al., 2016)

Dengan pendekatan ini, tata kelola strategik dan inovasi dapat diinsentifkan dan dikembangkan tanpa rasa takut melanggar hukum, dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat lokal. Kemajuan wilayah sangat dipengaruhi oleh inovasi yang terjadi di sana. Oleh karena itu, perlindungan atas inovasi yang dilakukan oleh unit pemerintah daerah sangat penting untuk kemajuan wilayah dan harus ada upaya untuk mendorong kreativitas lokal demi meningkatkan daya saing.

Inovasi menekankan pentingnya memasukkan kreativitas, kompleksitas sosial, dan ketidakpastian dalam tata kelola publik. Untuk menghadapi tantangan-tantangan kompleks di era dunia yang kini menjadi datar, yang diakibatkan globalisasi dan proliferasi teknologi, informasi, dan komunikasi (Fitriati, 2015; Friedman, 2006; Tapscott et al., 2008). Evolusi teknologi dan informasi menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya disrupsi (Kostoff et al., 2004; Sood & Tellis, 2011)

Untuk menanggapi dinamika disrupsi perubahan yang semakin kompleks, pemerintah perlu melakukan inovasi dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan (Christiansen & Bunt, 2012). Di sisi lain, terdapat urgensi yang mendalam bagi inovasi dalam sektor pemerintahan. Bukan hanya pada layanan yang diberikan kepada publik, tetapi juga pada struktur birokrasi dan administrasi yang mendukungnya. Dengan latar belakang yang terus berubah, penuh dengan ketidakpastian dan kompleksitas, pemerintah dan entitas layanan publik lainnya dituntut untuk merevisi dan menginovasi proses serta praktik

kebijakan publik yang ada. Hal ini bukan semata-mata untuk meningkatkan efisiensi, tetapi lebih jauh lagi untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warganya, bukan hanya sekedar pencapaian *output* yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, tertulis bahwa tujuan utama dari Inovasi Daerah adalah untuk meningkatkan efektivitas pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah. Dalam konteks pembangunan kota, ada kewajiban bagi pemerintah untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, mengoptimalkan tata kelola pemerintahan, dan sebagainya. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan publik yang lebih baik (Sari et al., 2020).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 disebutkan, bentuk Inovasi Daerah meliputi:

1. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
2. Inovasi pelayanan public
3. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Inovasi yang diinisiasi oleh pemerintah daerah bertujuan untuk memperbaiki efektivitas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Inovasi tersebut mencakup setiap jenis pembaruan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Pembaruan ini dapat diwujudkan melalui penerapan pengetahuan ilmiah, teknologi, dan penemuan-penemuan terbaru dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kegiatan Inovasi Daerah memiliki peran penting dalam mendorong dan mempercepat pembangunan suatu wilayah, yang esensial untuk mempertahankan eksistensi dan meningkatkan daya saing daerah tersebut. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa peran pemerintah daerah sangat krusial dalam pembangunan Inovasi Daerah.

Peran Pemerintah Daerah dalam memajukan inovasi sangat konstruktif, mulai dari penggalan gagasan sampai pada unsur pembiayaan yang

disesuaikan dengan kemampuan daerah. Menurut hasil riset Kartika (2020), pada era otonomi daerah perlu dilakukan langkah kongkret untuk menciptakan kemandirian, dengan memanfaatkan kekayaan lokal sebagai salah satu ukuran keberhasilan inovasi.

Untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien dan efektif, pemerintah berupaya meluncurkan inovasi berbasis teknologi untuk meminimalisir penggunaan waktu (Fitrianti et al., 2021). Inovasi tak hanya sekedar ide atau gagasan, tetapi juga melibatkan implementasi, integrasi dalam sistem, serta evaluasi jangka panjang. Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan ini dalam operasionalnya dengan mengintegrasikan inovasi sebagai bagian penting dari fungsi mereka. Adanya PP No. 38 Tahun 2017 menggambarkan komitmen Pemerintah Pusat dalam mendorong Pemerintah Daerah agar lebih inovatif dalam pembangunan daerahnya.

Dalam Peningkatan upaya dalam mengembangkan inovasi untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik. Beberapa inisiatif, seperti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik oleh

Kementerian PAN & RB, Innovative Government Award oleh Kementerian Dalam Negeri, dan Komisi Inovasi Nasional, telah diperkenalkan untuk memajukan inovasi dalam pelayanan publik.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mengadakan suatu kompetisi terkait Inovasi Daerah yaitu adalah “*Innovative Government Award* (IGA)”. Melalui program ini dapat Pemerintah Daerah akan terpacu untuk melaksanakan fungsinya dengan memperkuat pembangunan/peningkatan inovasi sebagai komponen yang digunakan, hal ini akan berdampak pada laju daya saing daerah melalui pertumbuhan inovasi. Tertuang di dalam

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, PP Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi Daerah, Kementerian Dalam Negeri diberi mandat untuk mengukur indeks Inovasi Daerah. IGA secara esensial adalah representasi nyata dari upaya Pemerintah Pusat dalam mendukung

dan mengawasi inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sekaligus menjadi *platform* untuk mempromosikan praktik terbaik yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pemberian Penghargaan IGA adalah metode untuk menilai keberhasilan suatu wilayah dalam menjalankan pembangunan Inovasi Daerah. Pemberian penghargaan ini akan menjadi sinyal bagi setiap pemerintah daerah agar dapat memacu inovasi-inovasi agar mendapat nilai atau skor yang baik. Apabila perolehan nilai yang diraih oleh suatu Pemerintahan Daerah mencapai nilai tinggi/baik dapat disimpulkan bahwa jelas terjadi peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah dari segi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan (Walinegoro et al., 2023).

Instrumen penilaian dari hasil pelaksanaan Inovasi Daerah sendiri akan mengacu pada Indeks Inovasi Daerah yang merupakan kumpulan Inovasi yang telah disampaikan ke Menteri Dalam Negeri sebagai representasi pembaruan dalam tata kelola pemerintahan daerah (Marsono et al., 2017). Pembaruan didefinisikan berdasarkan tugas dan otoritas

pemerintahan daerah di setiap levelnya. Hasil dari indeks ini menghasilkan peringkat inovasi untuk setiap pemerintahan daerah. Peringkat ini memberikan gambaran tentang pemetaan inovasi daerah, penganugerahan penghargaan, dan pembinaan untuk pemerintahan daerah. (Tan, 2019). Selain itu, perangkat daerah dikatakan berhasil dalam menjalankan fungsinya dalam berinovasi sebab keberhasilan pelaksanaan inovasi di daerah membutuhkan koordinasi dengan *stakeholders* antara pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan pada Bappeda Litbang Kota Palembang, karena memiliki Fungsi, tugas dan wewenang dalam penguatan Inovasi Daerah di Kota Palembang sesuai dengan sasaran Rencana Induk Kelitbang.

Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini membahas strategi dari Pemkot Palembang dalam upaya meningkatkan jumlah Inovasi Daerah yang ada pada perangkat daerah di Kota Palembang.

Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis pola kerja Pemkot

Palembang dalam meningkatkan Inovasi Daerah di Kota Palembang yang meliputi :

1. Penyelenggaraan peningkatan Inovasi Daerah Pemkot Palembang
2. Tahapan strategi Pemkot Palembang dalam meningkatkan Inovasi daerah secara kuantitas di Kota Palembang

Metode

Studi ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis strategi Pemkot Palembang dalam meningkatkan inovasi daerah (Creswell & Báez, 2020; Creswell & Creswell, 2018; Creswell & Poth, 2016; Denzin & Lincoln, 2019; Marshall & Rossman, 1989). Teknik mengumpulkan data, dengan wawancara mendalam, observasi dan telaah literatur. Wawancara mendalam dilakukan terhadap beberapa informan, termasuk Kepala Bappeda Litbang, Kepala Bidang (Kabid) Penelitian Pengembangan, Inovator Masyarakat, dan Pejabat Struktural lainnya.

Wawancara dilaksanakan dengan mendalam dan bersifat terbuka, memastikan informan menyetujui

posisinya sebagai nara sumber, dan memberi jawaban yang sesuai atau *informed consent* (Corbin & Strauss, 2008; Creswell & Poth, 2016; Patton, 2014). Sedangkan telaah literatur bertujuan untuk mengekstrak data dan informasi dari berbagai sumber seperti surat, peraturan, buku, hasil penelitian, jurnal, majalah, website, dan berbagai sumber dokumentasi lain yang kredibel.

Hasil Dan Pembahasan

Kota Palembang, dengan segala sumber daya dan potensi yang dimilikinya, menjadi pusat perhatian dalam konteks daya saing daerah, khususnya terkait pembangunan Inovasi Daerah. Namun, pada tahun 2018, terdapat indikasi kurangnya inovasi di kota ini. Meskipun terdapat peningkatan di tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2018 terjadi stagnansi. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode 2017-2018, Inovasi Daerah belum menjadi prioritas utama Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dalam upaya meningkatkan pembangunan inovatif melalui perangkat daerah yang ada.

Bersamaan dengan berjalannya waktu, Kota Palembang terus berubah dan berkembang untuk melakukan

pembenahan. Pemerintah Kota Palembang berhasil menduduki peringkat ke-4 sebagai kota terinovatif di Indonesia berdasarkan kompetisi IGA, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-4672 Tahun 2020 tentang Indeks Inovasi Daerah. Ini menandakan peningkatan signifikan dan kemajuan pesat dalam pembangunan Inovasi Daerah (lihat appendix 1).

Inovasi Daerah yang diselenggarakan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang ada di jajaran Pemkot Palembang menjadi sebuah bukti dimana ada tindakan cepat akibat catatan merah pada tahun 2018 dimana Kota Palembang menjadi kota yang tidak inovatif. Dalam suatu pembangunan inovasi daerah diperlukan suatu strategi pematangan agar dapat menjadi *main concept* sehingga Sistem Inovasi Daerah dapat berjalan dengan baik sehingga akan terintegrasi.

Berdasarkan hasil kajian Geoff Mulgan (2009), terdapat lima tahapan strategi pemerintahan. *Pertama*, '*purpose*', yang menjadi fondasi dari apa yang ingin dicapai oleh pemerintah. *Kedua*, *environment* atau lingkungan. *Ketiga*, '*direction*' atau arah yang perlu pemerintah pilih untuk mencapai tujuan

tersebut. *Keempat*, '*actions*' atau tindakan konkret. Tahapan *kelima*, '*learning*', di mana pemerintah mengevaluasi dan belajar dari setiap tindakan yang telah dipilih.

Dalam penerapannya strategi Pemerintah Kota Palembang menurut Teori Mulgan dianalisis sesuai dengan 5 tahapan strategi dalam Meningkatkan Jumlah Inovasi Daerah Kota Palembang meliputi :

Tahap Tujuan (*Purpose*)

Tahapan pertama pada strategi adalah tujuan (Bisri et al., 2023). Menentukan tujuan sangat diperlukan untuk mencapai suatu keberhasilan. Karena dengan adanya tujuan maka sebuah rencana yang telah dirancang akan menjadi terarah ke target yang telah direncanakan sebelumnya. Kesalahan dalam perencanaan akan mengakibatkan munculnya berbagai macam permasalahan dan konflik kepentingan di antara para stakeholders (Muhaimin, 2019).

Penentuan tujuan merupakan tinjauan mengenai sasaran yang hendak dicapai serta masalah yang hendak diselesaikan oleh pembuat strategi. Pada dasarnya tujuan merupakan sebuah

harapan dari kebutuhan masyarakat, nilainilai yang dimiliki masyarakat dan harapan masyarakat akan kesejahteraan serta kekhawatiran ataupun ancaman yang muncul.

Inovasi dalam sektor pelayanan publik didefinisikan sebagai ide kreatif teknologi atau pendekatan baru dalam teknologi pelayanan, atau pembaruan dari yang sudah ada, atau menciptakan terobosan atau penyederhanaan dalam aturan, pendekatan, prosedur, metode, atau struktur organisasi pelayanan untuk menghasilkan layanan yang lebih baik dari sisi kuantitas dan kualitas (Ray, 2020). Strategi Kota Palembang dalam meningkatkan Inovasi Daerah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, terutama untuk kegiatan pemerintah, aktivitas ekonomi masyarakat, dan bisnis di kota tersebut. Merealisasikan penguatan sistem inovasi daerah melibatkan penyesuaian dalam unsur organisasi, regulasi, dan budaya inovasi.

Tujuan dari Inovasi Daerah adalah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah.

Inovasi Daerah meliputi: (a) Pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan (b) Peningkatan produk atau proses produksi. Terkait tujuan hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Kepala

Setelah itu, fakta bahwa pada periode 2018 Kota Palembang menjadi kota yang tidak inovatif melalui surat Kementerian Dalam Negeri menjadi acuan yang memicu program kerja pembangunan Inovasi Daerah yang ada di Kota Palembang. Hal ini disampaikan juga Kepala Bidang Litbang yang dalam pernyataannya sebagai :

Sebanyak 11 Provinsi (32,4%) di daerah Sumatera dan Jawa telah dicatat dengan kategori Sangat Inovatif, dengan total 1148 inovasi yang telah dikumpulkan. Ini berarti 14,3% dari inovasi tersebut berasal dari pemerintah provinsi di kawasan Sumatera dan Jawa, yang di dalamnya termasuk Kota Palembang (Tan, 2019). Dalam merancang strategi, menetapkan tujuan adalah tahap pertama yang esensial untuk memberikan petunjuk selama pelaksanaan, sehingga sasaran yang diinginkan dapat tercapai.

Langkah awal yang dilakukan dalam perencanaan strategi yaitu

memahami tujuan dan prioritas. Tujuan dan prioritas Bappeda Litbang Kota Palembang dalam meningkatkan Inovasi daerah tahun 2019 sampai 2020 dikarenakan merupakan isu strategis dalam rangka kemajuan suatu daerah sehingga pembaharuan dalam rangka gelar pemerintahan tercapai akan sesuai dengan jalannya visi misi Kota Palembang 2018-2023. Dengan mengembangkan Inovasi Daerah, tidak hanya memberikan peningkatan pada kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, tetapi juga memberikan dampak sehingga dapat mencapai output yang diharapkan agar dapat memberikan pengaruh signifikan ke masyarakat sesuai dengan urusan perangkat daerah.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dipaparkan diatas, meningkatkan Inovasi Daerah yang ada di Kota Palembang sudah menjadi isu strategis yang memang dimatangkan untuk segera dikerjakan oleh jajaran Pemerintah Kota Palembang, dengan gagalnya Kota Palembang yang diberi status kota tidak inovatif pada tahun 2018. Dengan demikian, penulis beranggapan bahwasanya dalam strategi meningkatkan Inovasi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota

Palembang melalui Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Palembang

Tahap Lingkungan (*Environment*)

Dalam memahami tercapai atau tidaknya tujuan tujuan, maka perlu adanya analisis yang mendalam terkait lingkup atau lingkungan yang ada. Lingkungan merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu strategi. Strategi yang baik adalah strategi yang mendorong pemerintah daerah kota Palembang dalam upayanya meningkatkan inovasi daerah hadap jajaran perangkat daerah yang ada di pemerintah kota Palembang.

Di sisi lain, lingkungan berpengaruh dalam keberhasilan menjalankan suatu strategi bagaimana itu mendukung atau tidaknya pembangunan dan pengembangan dalam peningkatan jumlah inovasi daerah di kota Palembang. Lingkungan dapat digambarkan dengan kondisi dan situasi terjadi. Lingkungan dari tujuan yang telah ditetapkan strategi bergantung pada situasi yang dihadapi dan hal hal yang mempengaruhi nya.

Pada dasarnya dalam meningkatkan inovasi daerah pada perangkat daerah di kota Palembang tidak terlepas dari sinergitas antar OPD Kota Palembang yang menunjukkan pentingnya peran lembaga (Forbes & Milliken, 1999; Ghosh & John, 2005).

Dalam membangun sebuah ekosistem pemerintahan agar dapat memiliki satu kepehaman atau koordinasi secara menyeluruh antar organisasi perangkat daerah diperlukan landasan landasan agar dapat terjadi kesepakatan bersama. Sesuai dengan pernyataan dari Kepala Bidang Litbang Kota Palembang

Sebagai salah satu sektor atau tahapan keberhasilan dari strategi, maka lingkungan yang ada di dalam jajaran pemerintah kota Palembang diperhatikan karena jelas akan memberikan pengaruh yang besar bagi pelaksana suatu strategi. Strategi yang baik akan mendorong kebebasan untuk kota Palembang dalam upaya meningkatkan jumlah inovasi daerah di kota Palembang.

Lingkungan sangat berpengaruh dalam jalannya strategi dilihat bagaimana lingkungan pemerintahan kota Palembang tersebut mendukung

atau tidaknya dalam peningkatan Inovasi Daerah. Dalam meningkatkan inovasi daerah melihat faktual pada periode sebelumnya jelas akan banyak faktor-faktor yang menghambat akan pembangunan inovasi daerah itu di kota Palembang.

Tahap Pengarahan (*Directions*)

Pada pelaksanaan dalam meningkatkan Inovasi Daerah di Kota Palembang maka memerlukan arahan yang jelas. Arahan yang baik adalah arahan yang jelas namun memberikan ruang untuk beradaptasi dalam suatu kondisi sehingga mencerminkan adanya tata kelola pemerintahan yang baik (Doeveren, 2011; Mulgan & Potucek, 2004; Osborne, D. and Gaebler, T., 1992; Osborne, 2006; Pollitt & Bouckaert, 2011, 2017).

Lebih lanjut arahan dapat dikatakan efektif apabila memberikan kejelasan prioritas yang akan dilaksanakan oleh atasan, lalu dapat dipahami oleh bawahan dengan baik. Pengarahan diberikan pada pihak-pihak terkait yang ikut serta dalam upaya meningkatkan Inovasi di Kota Palembang dimana disini jelas melibatkan perangkat daerah,

akademisi, dan masyarakat. Pengarahan diberikan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan pelaksanaannya berjalan dengan benar, memiliki petunjuk yang jelas, dan terhindar dari penyimpangan yang dapat meningkatkan risiko kegagalan dalam mencapai tujuan yang ditargetkan.

Arahan yang dilukan oleh Walikota Palembang dalam upaya meningkatkan kesadaran perangkat daerah dalam mengembangkan Inovasi Daerah muncul pada himbauan kepada setiap OPD agar berinovasi minimal satu Inovasi. Hal ini seperti yang disampaikan Kabid Penelitian Pengembangan Kota Palembang yang mengatakan bahwa dalam implementasi pengarahannya maka dibuatlah sebuah pemetaan dilakukan terkait Inovasi Daerah yang berada di OPD di lingkungan Pemkot Palembang.

Pemetaan Inovasi, yang juga dikenal sebagai RoadMap SIDA, adalah kebijakan yang bertindak sebagai panduan dalam menentukan arah pembangunan berbasis inovasi di Kota Palembang. Pengamatan ini bertujuan untuk menggabungkan berbagai institusi, termasuk institusi pemerintah sektoral dan lintas sektoral, lembaga

penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan, lembaga pendukung inovasi, dunia bisnis, dan masyarakat. Dalam kerangka kebijakan, Road Map SIDA dirancang sebagai petunjuk untuk inovasi yang mendukung berbagai program di Kota Palembang serta berbagai peraturan terkait lainnya.

Dapat dikatakan bahwa dalam meningkatkan Inovasi Daerah di kota Palembang konsep utama sudah direncanakan di pemetaan Inovasi Daerah yang disiapkan oleh tim Litbang dimana menjadi dasar-dasar pelaksanaan Inovasi Daerah di Kota Palembang. Pada Bappeda Litbang, pada tahapan pengarahannya dalam pengembangan Inovasi Daerah juga sudah menjadi landasan strategik (Pangestu, 2022). Pada arah kebijakan yang menjadi rencana induk salah satunya meningkatkan pendayagunaan ekosistem berinovasi.

Memperhatikan visi kota Palembang khusus pengembangan Inovasi Daerah dijadikan kunci guna meningkatkan daya saing daerah. Target kinerja Pemerintah Kota sudah muai diarahkan untuk menggunakan pendekatan Inovasi sebagai perangkat bekerja guna dapat mengakselerasikan

kegiatan pemerintahan sesuai dengan fungsi setiap perangkat daerah. Selaras dengan seluruh tahapan pembangunan dan penyelesaian permasalahan perkotaan didekatkan dengan cara dan ide baru yang lebih mengedepankan kolaborasi dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Tahap Aksi (*Action*)

Pelaksanaan strategi melalui tindakan konkret dan pengelolaan yang efektif adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dalam meningkatkan Inovasi Daerah di Kota Palembang. Tindakan yang dilakukan sesuai dengan tujuan, kondisi lingkungan, dan arahan yang sistematis sehingga dapat mencapai keberhasilan strategi yang telah dibuat. Dalam rangka meningkatkan Inovasi Daerah yang nantinya akan berdampak pada pola kerja penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palembang dari segi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, diperlukan suatu tindakan atau aksi dalam rangka mencapai tujuan.

Adapun strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang khususnya Bappeda Litbang Kota Palembang dalam meningkatkan Inovasi

Daerah di Kota Palembang yaitu strategi penguatan pendekatan kepada setiap perangkat daerah yang ada di jajaran pemerintahan dan penguatan regulasi. Bappeda Litbang Kota Palembang khususnya Bidang Litbang disini berperan dan bertindak sebagai fasilitator dan koordiantor dalam pengembangan Inovasi Daerah.

Dalam pelaksanaannya pada Bappeda Litbang sendiri dalam rangka menrangsang seluruh OPD untuk berinovasi memang sangat fokus pada sosialisasi agar kesadaran dalam berinovasi dapat ditumbuhkan. Sosialisai terkait Inovasi Daerah pada periode 2019-2020 memang sangat didorong oleh Bidang Litbang, dikarenakan memang pada periode sebelumnya akibat kurangnya sosialisasi terkait Inovasi Daerah memang kesadaran yang ada pada setiap Perangkat Daerah masih sangat kurang.

Dengan tidak dipenuhinya komunikasi pada pengembangan Inovasi sebelumnya banyak perangkat daerah yang tidak serius dalam menjalankan pembangunan Inovasi Daerah ini. Penguatan koordinasi antar Perangkat Daerah dijalin secara kuat

dan berkelanjutan, gebrakan metode kerja dari Bappeda Litbang dalam mendukung perangkat Daerah melaksanakan Inovasi Daerah ini adalah dengan menyampaikan informasi untuk Inovasi Daerah baik mengundang Ahli dari Kementerian Dalam Negeri, Akademisi, dan Masyarakat.

Program sosialisasi oleh Bappeda Litbang dilaksanakan secara intens dan rutin dengan giat mengundang Organisasi Perangkat Daerah, pada pelaksanaannya untuk yang sudah memiliki Inovasi Daerah yang dianggap matang dan sudah berjalan secara baik di bidang litbang sendiri didorong untuk melakukan pembaharuan pada inovasinya atau giat mengembangkan inovasi baru dalam rangka mendukung kinerja OPD terkait sesuai dengan fungsinya masing-masing. Setelah itu, Pada OPD yang masih atau belum memiliki inovasi yang baik dan kurang matang dari segi kualitas dan kuantitas terus didorong dengan memberikan informasi-informasi terkait apa saja Inovasi Daerah yang bisa dilakukan sesuai dengan fungsi masing-masing, atau setidaknya mereplikasi Inovasi Daerah yang sudah ada dengan menggunakan

adaptasi atau pembaharuan sesuai dengan kebutuhan dan kegunaan yang cocok pada OPD terkait.

Setelah dilaksanakan Sosialisasi dan penyampaian kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka ekstensifikasi program peningkatan Inovasi Daerah Bappeda Litbang juga melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat untuk menjadi Inovator. Program konkrit yang dilaksanakan adalah dengan mengadakan lomba kompetisi Inovasi Daerah, program ini mengusung tema UMKM yang dimana masyarakat yang akan menjadi inovator yang selanjutnya akan ditunjang dimana dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan Inovasi apa yang sesuai dengan bidang dari Inovasi Masyarakat Tersebut.

Hal Ini disampaikan oleh salah satu Inovator Masyarakat Meri Ariyanti yang memenangkan Lomba Kompetisi Inovasi Daerah, dimana mengembangkan potensi jamu herbal dengan menggunakan adopsi teknologi budidaya tanaman biofarmaka.

Dengan adanya lomba ini bantuan hadiah dari Bappeda Litbang jelas akan juga menunjang

pengembangan lebih jauh dari inovasi yang dikembangkan ini. Program lomba kompetisi inovasi daerah ini memang ditujukan untuk menemukan dan menggali kreativitas Inovasi di masyarakat dalam rangka mendorong terbentuknya budaya yang inovatif, kreatif, dan produktif untuk meningkatkan daya saing daerah sehingga mampu bersaing secara regional dan nasional. Hal ini sesuai dengan dari apa yang sudah dicantumkan pada RPJMD Kota Palembang tahun 2018-2023.

Tahap Evaluasi (Learning)

Dalam pencapaian keberhasilan strategi, pembelajaran atau evaluasi adalah langkah terakhir yang dilakukan. Pembelajaran merupakan sistem untuk mengetahui tolak ukur keberhasilan dari strategi daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Palembang.

Evaluasi dilakukan sebagai proses penilaian pada suatu hal yang telah dikerjakan. Hasil-hasil yang tidak sesuai dengan perencanaan pada akhirnya merupakan hal yang wajar. Kunci dari keberhasilan adalah bahwa dapat beradaptasi dengan cepat dan belajar dari kegagalan, maka akan

sangat baik jika tujuan yang belum dicapai dikaji dan dievaluasi, begitupun program-program yang sudah berjalan dengan baik dievaluasi kembali oleh pihak berwenang. Khususnya Bappeda Litbang yang menjadi koordinator dalam pembangunan Inovasi Daerah di Kota Palembang.

Dalam melakukan evaluasi, sebaiknya pemerintah harus turun langsung ke lapangan, memastikan kekurangan dan tidak tepatnya sasaran program yang sudah berjalan. Ini bertujuan untuk mendapatkan umpan balik yang memberikan informasi tentang apa yang efektif dan apa yang tidak, sehingga memungkinkan perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut. Dengan adanya evaluasi diharapkan kelebihan atau kekurangan yang terjadi dapat dijadikan pembelajaran dan diperbaiki untuk menghindari kekurangan yang lain. Hasil yang dicapai dapat menjadi pembelajaran untuk terus konsisten terhadap tindakan dalam meningkatkan Inovasi Daerah.

Salah satu bentuk pembelajaran yang dilakukan Bappeda Litbang Kota Palembang adalah dengan mengadakan evaluasi dengan semua pihak yang terlibat. Evaluasi selain dapat mengukur

sampai sejauh mana program yang ditetapkan telah berhasil, juga sebagai bentuk adaptasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dalam memperbaiki program atau kebijakan kedepannya. Dengan hasil dari Kompetisi Innovative Government Award 2020 yang menetapkan Kota Palembang menjadi kota yang sangat inovatif dan pada tahun selanjutnya terus menempati menjadi kota yang inovatif, sebenarnya sudah membuktikan metode kerja yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang melalui Bappeda Litbang terbilang efektif.

Dari evaluasi yang telah dilakukan, Pemerintah Kota Palembang menyadari bahwa dalam meningkatkan Inovasi Daerah masih terjadi banyak hambatan pada pelaksanaannya. Hambatan tersebut dimaknai sebagai kekurangan dalam sebuah kebijaksanaan. Pada akhirnya kebijakan yang diterapkan sebenarnya masih ditingkatkan lagi agar lebih efisien dalam pencapaian tujuan.

Kesimpulan

Pemerintah Kota Palembang dalam beberapa tahun terakhir

menunjukkan komitmen yang kuat terhadap peningkatan inovasi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada lima tahapan kunci yang menjadi pilar dari strategi mereka.

Sebagai respons terhadap umpan balik dari kompetisi *Innovative Government Award* 2018, Pemerintah Kota Palembang dengan menetapkan visi dan misi yang spesifik untuk memperkuat pembangunan Inovasi Daerah. Mengingat tahun 2018 yang kurang menonjol dalam inovasi, terdapat urgensi untuk melakukan revitalisasi.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Bappeda Litbang Kota Palembang berperan sebagai entitas kunci yang tidak hanya fungsional sebagai pendukung, tetapi juga sebagai katalis inovasi daerah. Melalui sinergi antar perangkat daerah yang dirancang secara strategis oleh kepemimpinan kota, implementasi strategi inovasi daerah menjadi lebih terintegrasi.

Dari perspektif perencanaan, Pemerintah Kota Palembang telah menyusun dan menetapkan *blueprint* operasional yaitu Roadmap SIDA yang menjadi acuan bagi seluruh entitas pemerintahan di kota ini untuk

berkolaborasi dalam pencapaian visi inovasi. Sebagai bukti implementasi, Pemerintah Kota Palembang, melalui Bappeda Litbang, telah mencapai prestasi signifikan, seperti tercermin dalam perolehan peringkat keempat pada klaster nasional dalam kompetisi *Innovative Government Award* 2020.

Poin penting lainnya adalah kapabilitas Pemerintah Kota Palembang dalam melakukan introspeksi dan evaluasi. Secara periodik, mereka mengkaji ulang dan memodifikasi program-program berdasarkan umpan balik dan hasil dari Indeks Inovasi Daerah pada kompetisi *Innovative Government Award* setiap tahun. Hal ini mencerminkan komitmen yang tinggi dari pemerintah kota untuk inovasi berkelanjutan. Kesimpulannya, melalui pendekatan strategis ini, Pemerintah Kota Palembang telah berhasil dalam meningkatkan inovasi daerah, dengan tujuan pertumbuhan dan kemajuan berkelanjutan bagi kota dan penduduknya.

Referensi

- Bisri, M. H., Alamsyah, A. K., Nuzula, S. R., & Hadi, M. N. (2023). Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan Potensi Desa Melalui Wisata Edikasi Kampung Nanas: (Studi di Desa Palaan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang). *Journal of Governance Innovation*, 5(1), 94–110. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i1.2369>
- Christiansen, J., & Bunt, L. (2012). Innovation in policy: Allowing for creativity, social complexity and uncertainty in public governance. In *NESTA Report, October*.
- Corbin, J., & Strauss, A. (2008). *Basics of Qualitative Research (3rd ed.): Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781452230153>
- Creswell, J. W., & Báez, J. C. (2020). *30 essential skills for the qualitative researcher*. Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, Inc.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2019). *Handbook of Qualitative Research*. SAGE Publications.
- Doeveren, V. van. (2011). Rethinking Good Governance. *Public Integrity*, 13(4), 301–318. <https://doi.org/10.2753/PIN1099-9922130401>
- Fitrianti, A. A., Cellindita, S., & Pramnesti, K. (2021). Efektivitas inovasi program smart kampung di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi. *Journal of Governance Innovation*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v3i1.438>
- Fitriati, R. (2015). Menguak Daya Saing UMKM Industri Kreatif: Sebuah Riset Tindakan Berbasis Soft Systems Methodology. In *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Forbes, D. P., & Milliken, F. J. (1999). Cognition and corporate governance: Understanding boards of directors as strategic decision-making groups. *Academy of Management Review*, 24(3), 489–505. <https://doi.org/10.2307/259138>
- Friedman, T. L. (2006). The world is flat: The globalized world in the twenty-first century. In *(No Title)*. Picador; Third edition. https://media.nesta.org.uk/documents/innovation_in_policy_RgbLJKC.pdf
- Ghosh, M., & John, G. (2005). Strategic fit in industrial alliances: an empirical test of governance value analysis. *Journal of Marketing Research*, 42(3), 346–357. <https://doi.org/10.1509/jmkr.2005.42.3.346>
- Kartika, R. S. (2020). Karakteristik Inovasi Daerah Berbasis Potensi Wilayah di Kota Bandung dan Kabupaten Sleman. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 12(1 SE-Articles). <https://jkpjjournal.com/index.php/menu/article/view/117>

- Kostoff, R. N., Boylan, R., & Simons, G. R. (2004). Disruptive technology roadmaps. *Technological Forecasting and Social Change*, 71(1–2), 141–159. [https://doi.org/10.1016/S0040-1625\(03\)00048-9](https://doi.org/10.1016/S0040-1625(03)00048-9)
- Marshall, C., & Rossman, G. B. (1989). *Designing Qualitative Research*. SAGE Publications, Inc.
- Marsono, Yohanitas, W. A., Suhartono, O., Kusuma, H. B., & G, T. (2017). *Panduan Pengukuran Indeks Persepsi Inovasi Pelayanan Publik*. Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara.
- Muhaimin, H. (2019). Tata Kelola Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.296>
- Mulgan, G. (2009). *The art of public strategy: Mobilizing power and knowledge for the common good*. Oxford University Press, USA.
- Mulgan, G., & Potucek, M. (2004). Strategy in Government: The United Kingdom Experience. In *The Capacity to Govern in Central and Eastern Europe*.
- Ochrana, F., Plaček, M., & Pucek, M. J. (2016). Shortfall of strategic governance and strategic management in the czech republic. *Central European Journal of Public Policy*, 10(2), 30–47. <https://doi.org/10.1515/cejpp-2016-0024>
- Osborne, D. and Gaebler, T., E. (1992). *Reinventing Government. How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector*. Penguin Books USA Inc.
- Osborne, S. P. (2006). The New Public Governance? *Public Management Review*, 8(3), 377–387. <https://doi.org/10.1080/14719030600853022>
- Patton, M. Q. (2014). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2011). *Continuity and change in public policy and management*. Edward Elgar Publishing.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public Management Reform: A Comparative Analysis - Into The Age of Austerity* (4th ed.). Oxford University Press.
- Ray, R. I. W. (2020). Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam Penerapan Sistem Check-In dan Boarding Pass pada PT KAI DAOP I Jakarta (Studi Kasus Layanan Check In dan Boarding Pass di Stasiun Senen Jakarta). *Journal of Governance Innovation*, 2(1), 32–52. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.387>
- Sari, D. N., Rahmadani, D. Z., & Wardani, M. Y. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Inovasi Smart City. *Journal of Governance Innovation*, 2(2), 112–130. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i2.435>
- Sood, A., & Tellis, G. J. (2011). Demystifying disruption: A new model for understanding and predicting disruptive technologies. *Marketing Science*, 30(2), 339–354. <https://doi.org/10.1287/mksc.1100>

- 0617
Tan, M. (2019). Kebijakan Inovasi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. In *Jakarta, November* (Vol. 21).
<https://bappelitbangda.purwakartakab.go.id/assets/upload/dokumen/7321ee34a7801c68f165aff5e1938899.pdf>
- Tapscott, D., Williams, A. D., & Herman, D. (2008). Government 2.0: Transforming government and governance for the twenty-first century. *New Paradigm*, 1, 15.
- Walinegoro, B. G., Saputra, G., Inayah, F., & Sari, L. W. (2023). Tata Kelola Inovasi Layanan Publik: Program Lasamba (Layanan Sumbang Warga) Dinas Sosial Kabupaten Sleman. *Journal of Governance Innovation*, 5(1), 42–60.
<https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i1.2285>

Memiliki sertifikat Pendidik Dosen, Certified International Research Reviewer (CIRR) KAN, Sertifikat DIKTI Reviewer Penelitian Angk XVII Kemenristek-Dikti, dan 16 sertifikat BNSP termasuk Asesor dan Master Trainer, Penulis dan Editor. Memiliki 27 ISBN sebagai penulis buku, dan 26 HKI

Korespondensi: rachma.fitriati@ui.ac.id

Profil

Muhammad Ganesha Putra, memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P) dari Universitas Padjajaran pada tahun 2022. Saat ini, melanjutkan Pendidikan di Magister Program Administrasi Kebijakan Publik di Universitas Indonesia. Korespondensi email: muhammad.ganesha21@ui.ac.id.

Rachma Fitriati, Dosen Pasca Sarjana FIA UI dengan pendidikan terakhir Doktor Ilmu Administrasi FISIP UI dan Master Total War Strategi Universitas Pertahanan (Unhan).

 0000-0002-5095-1256.

 wY0DCOGAAAAJ,

 57209255192

 6040387